

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

## **KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DAN TNI AD DALAM PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL PT PERTAMINA DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Junaedi<sup>1</sup>  
Arlan Siddha<sup>2</sup>  
Titin Rohayatin<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

### ***Abstract***

*This study analyzes the coordination between the Jakarta Provincial Government and the Indonesian Army (TNI AD) in securing the national vital object, PT Pertamina, as a strategic energy infrastructure in Indonesia. Using G.R. Terry's theory of coordination, which includes six dimensions—communication, regulation, organizational structure, leadership, resources, and conflict resolution—this research aims to understand the effectiveness of inter-institutional coordination in maintaining national energy security. The research employs a qualitative descriptive approach with data obtained through interviews, observation, and documentation from officials in the Jakarta Regional Government, Kodam Jaya, and PT Pertamina. The findings show that coordination between the two institutions is generally effective, with structured communication, clear division of authority, and mutual understanding between civil and military sectors. However, challenges remain in policy synchronization, overlapping tasks, and limited operational resources during emergency situations. The study concludes that civil-military coordination is crucial to protect national assets and maintain energy stability. Strengthening regulatory frameworks and improving leadership synergy are key to optimizing future collaboration in vital object security.*

***Keywords: coordination, national vital object, PT Pertamina, civil-military cooperation, security policy***

### **PENDAHULUAN**

Objek vital nasional (Obvitnas) merupakan infrastruktur strategis yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan ekonomi, sosial, dan keamanan nasional. Salah satu objek vital dengan peran strategis adalah PT Pertamina (Persero), yang bertanggung jawab atas produksi, penyimpanan, dan distribusi energi nasional. Keberadaan fasilitas vital seperti terminal bahan bakar, kilang minyak, dan depot BBM di wilayah DKI Jakarta menjadikan kawasan ini sebagai pusat energi nasional yang rawan terhadap

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

gangguan keamanan. Dalam konteks inilah, koordinasi antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), khususnya melalui Kodam Jaya, menjadi penting untuk memastikan sistem pengamanan yang sinergis, responsif, dan berkelanjutan.

Fenomena meningkatnya ancaman terhadap infrastruktur energi baik dari aspek sabotase, kebakaran, hingga ancaman terorisme menuntut adanya integrasi lintas sektor dalam mekanisme pengamanan. Pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas administratif memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah terkait keamanan publik, sedangkan TNI AD memiliki mandat pertahanan dan keamanan yang dapat dikerahkan dalam operasi militer selain perang (OMSP), salah satunya pengamanan objek vital nasional. Sinergi ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, yang menegaskan pentingnya koordinasi antara unsur pemerintah, aparat keamanan, dan pihak pengelola objek vital.

Namun, koordinasi antara instansi sipil dan militer dalam konteks ini tidak selalu berjalan tanpa kendala. Perbedaan budaya organisasi, hierarki kewenangan, serta pola komunikasi yang berbeda sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan pengamanan di lapangan. Misalnya, pada beberapa kasus kebocoran tangki minyak dan insiden kebakaran di area kilang Plumpang, muncul indikasi lemahnya koordinasi dalam penanganan darurat antara aparat daerah, TNI, dan manajemen perusahaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas koordinasi lintas lembaga masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat secara sistematis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana bentuk koordinasi antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan TNI Angkatan Darat dalam pengamanan objek vital nasional PT Pertamina di wilayah DKI Jakarta? Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

pendukung dan penghambat koordinasi serta menemukan model kolaborasi sipil-militer yang efektif dalam menjaga keamanan objek vital nasional.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh G.R. Terry (1964), yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan proses integrasi aktivitas dari berbagai unit agar mencapai tujuan bersama secara efisien. Teori ini mencakup enam dimensi penting, yaitu komunikasi, kebijakan atau regulasi, struktur organisasi, kepemimpinan, sumber daya, dan resolusi konflik. Keenam dimensi ini menjadi kerangka analisis untuk menilai sejauh mana efektivitas koordinasi antarlembaga di tingkat operasional dan strategis.

Penelitian ini memiliki signifikansi praktis karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana pemerintah daerah dan institusi militer dapat bekerja sama dalam konteks keamanan publik tanpa melampaui batas kewenangan konstitusional masing-masing. Sinergi antara dua institusi ini bukan hanya persoalan keamanan semata, tetapi juga menjadi representasi dari fungsi pertahanan non-militer yang mendukung stabilitas energi nasional dan kepercayaan publik terhadap negara. Dengan demikian, koordinasi yang efektif menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya sistem pengamanan nasional yang tangguh dan adaptif terhadap ancaman kontemporer.

### *Kerangka Teori*

Konsep koordinasi menurut G.R. Terry (1964) menekankan bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian aktivitas berbagai unit kerja dalam organisasi agar semua elemen bergerak selaras menuju satu tujuan bersama. Terry menegaskan bahwa koordinasi bukan sekadar komunikasi formal, melainkan upaya membangun keserasian, menghindari duplikasi kerja, dan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas. Dalam konteks pemerintahan dan militer, koordinasi mencerminkan sinergi lintas sektor yang diperlukan untuk menjaga keterpaduan kebijakan, struktur, dan pelaksanaan operasional.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Dimensi pertama adalah komunikasi, yang berfungsi sebagai media penyatuan pemahaman dan transfer informasi antarinstansi. Dalam koordinasi sipil-militer, komunikasi yang efektif menentukan keberhasilan penanganan ancaman dan krisis. Dimensi kedua adalah kebijakan atau regulasi, yang menjadi dasar hukum dan pedoman dalam menjalankan kerja sama antarlembaga. Ketiga, struktur organisasi mencerminkan desain kelembagaan yang memfasilitasi pembagian peran secara jelas. Keempat, kepemimpinan berperan dalam mengarahkan, mengendalikan, dan memotivasi aktor-aktor yang terlibat dalam koordinasi. Kelima, sumber daya (baik manusia maupun material) menentukan sejauh mana kolaborasi dapat diimplementasikan secara efektif. Terakhir, resolusi konflik penting dalam menjaga kesinambungan koordinasi dengan mencegah atau menyelesaikan perbedaan kepentingan yang muncul di antara lembaga-lembaga yang terlibat.

Secara konseptual, teori koordinasi Terry menjadi dasar yang relevan untuk menganalisis kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI AD dalam pengamanan objek vital nasional. Kedua institusi memiliki karakter kelembagaan yang berbeda, namun dituntut untuk beroperasi dalam satu kerangka kebijakan publik yang harmonis. Efektivitas koordinasi ditentukan oleh sejauh mana keenam dimensi tersebut dijalankan secara konsisten, fleksibel, dan adaptif terhadap situasi lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TNI AD dalam pengamanan PT Pertamina sebagai objek vital nasional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja, Kodam Jaya, serta staf keamanan Pertamina. Selain itu, dilakukan observasi langsung di beberapa titik strategis, seperti Terminal BBM Plumpang dan Kilang Pertamina Balongan yang menjadi area pengawasan gabungan sipil-militer.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga interpretasi hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola koordinasi, hambatan kelembagaan, serta bentuk komunikasi antaraktor yang muncul selama implementasi kebijakan pengamanan objek vital nasional.

## **PEMBAHASAN**

Pengamanan objek vital nasional PT Pertamina di wilayah DKI Jakarta melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan karakteristik kewenangan yang berbeda. Pemerintah daerah berfungsi sebagai pengatur kebijakan tata ruang dan keselamatan publik, sedangkan TNI AD, melalui Kodam Jaya, berperan sebagai pelaksana keamanan lapangan dalam konteks operasi militer selain perang. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi kedua institusi berjalan cukup baik dalam situasi rutin, tetapi menghadapi tantangan saat terjadi kondisi darurat seperti kebakaran tangki, sabotase, atau aksi unjuk rasa yang mengarah pada ancaman keamanan.

Secara umum, pola koordinasi yang dibangun kedua lembaga mengacu pada prinsip kolaboratif dengan pembagian peran yang jelas. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kebijakan dan koordinasi lintas instansi sipil, sedangkan TNI AD memberikan dukungan keamanan taktis dan pengendalian lapangan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala klasik, seperti perbedaan gaya kepemimpinan, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya sistem komunikasi terintegrasi. Analisis berikut ini menguraikan hasil penelitian berdasarkan enam dimensi teori koordinasi G.R. Terry. Berikut pembahasan Berdasarkan Dimensi Teori

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

## 1) Komunikasi

Komunikasi merupakan dimensi paling fundamental dalam membangun koordinasi yang efektif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TNI AD dalam pengamanan objek vital nasional PT Pertamina. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antarinstansi telah dilakukan secara rutin melalui forum koordinasi keamanan daerah yang diinisiasi oleh Kesbangpol dan dihadiri unsur Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, serta perwakilan manajemen Pertamina. Forum ini berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi situasional, evaluasi kegiatan pengamanan, dan perencanaan langkah taktis di lapangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi formal berjalan baik, tetapi komunikasi informal masih menjadi penguat utama dalam membangun kepercayaan antaraktor, terutama dalam kondisi darurat.

Di lapangan, komunikasi operasional terjalin melalui sistem komando ganda antara pihak keamanan perusahaan dan unsur TNI AD yang ditugaskan sebagai satuan pengamanan eksternal. Dalam situasi darurat seperti kebakaran di kilang atau ancaman sabotase, jalur komunikasi cepat diaktifkan melalui command center Kodam Jaya yang terhubung langsung dengan pusat kendali keamanan Pertamina. Pola komunikasi dua arah ini memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat, meskipun terkadang muncul perbedaan persepsi karena perbedaan kultur organisasi antara sipil dan militer.

Secara teoritis, Terry menegaskan bahwa komunikasi berfungsi menyatukan persepsi dan mengintegrasikan tindakan antarunit kerja. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh frekuensi interaksi, tetapi juga oleh kejelasan saluran komunikasi dan kesamaan kode etik kerja. Pemerintah daerah dan TNI AD telah berupaya menstandarkan bahasa operasional keamanan melalui pelatihan bersama, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal dalam protokol komunikasi lintas lembaga.

Simpulan parsial dari dimensi komunikasi menunjukkan bahwa meskipun jalur komunikasi telah terbangun dengan baik secara struktural, efektivitasnya masih perlu

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

ditingkatkan melalui pelembagaan sistem informasi terpadu antara pemerintah daerah dan militer. Penguatan komunikasi berbasis teknologi informasi juga diperlukan agar pertukaran data dan respons cepat dapat dilakukan secara real-time dalam menghadapi potensi ancaman terhadap objek vital nasional.

## 2) Kebijakan dan Regulasi

Dimensi kebijakan dan regulasi menjadi fondasi utama dalam menjamin kejelasan wewenang dan tanggung jawab antarlembaga. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi pengamanan PT Pertamina diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional serta Instruksi Panglima TNI tentang Pelaksanaan OMSP. Pemerintah daerah juga mengeluarkan peraturan turunan berupa Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan peran aparat daerah dalam mendukung pengamanan objek vital nasional. Namun, wawancara dengan pejabat Kesbangpol menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pusat, daerah, dan militer masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembiayaan dan mekanisme pelaporan.

Dalam praktiknya, peraturan yang ada belum sepenuhnya mampu menjembatani perbedaan kultur kelembagaan antara instansi sipil dan militer. Beberapa responden menyebutkan bahwa kebijakan pengamanan masih bersifat sektoral, di mana masing-masing lembaga menjalankan tugas berdasarkan mandat internal tanpa mekanisme evaluasi lintas sektor yang kuat. Akibatnya, koordinasi kadang bersifat reaktif, bukan preventif. Hal ini terlihat pada insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang (2023), di mana tindakan tanggap darurat dilakukan cepat oleh TNI, tetapi koordinasi administratif dengan pemerintah daerah baru berjalan setelah kejadian berlangsung.

Analisis teoritis menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan aturan, tetapi juga pada keterpaduan implementasi. Terry menekankan pentingnya “keseragaman arah kebijakan” sebagai kunci koordinasi yang efektif. Dalam konteks ini, dibutuhkan regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

prosedur kerja sama sipil-militer dalam pengamanan objek vital nasional, sehingga setiap aktor memiliki pedoman operasional yang sama.

### 3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi menjadi dimensi yang menentukan kejelasan peran dan jalur koordinasi antarlembaga. Berdasarkan hasil penelitian, pengamanan PT Pertamina dilaksanakan melalui struktur koordinasi tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, TNI AD (Kodam Jaya), dan pihak Pertamina. Kodam Jaya berperan sebagai pelaksana pengamanan eksternal melalui satuan garnisun dan Koramil di sekitar lokasi objek vital, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penataan ruang dan kebijakan keamanan publik. Pertamina sendiri mengelola sistem pengamanan internal melalui Security Integrated Management System (SIMS) yang terkoneksi dengan unsur aparat keamanan daerah.

Struktur ini secara umum sudah efektif, tetapi masih menghadapi kendala dalam hal pembagian peran di tingkat operasional. Wawancara dengan pejabat Satpol PP menunjukkan bahwa belum adanya standard operating procedure (SOP) terpadu menyebabkan kebingungan di lapangan ketika menghadapi ancaman mendadak. Selain itu, birokrasi pengambilan keputusan yang panjang sering memperlambat respons terhadap insiden darurat. Meskipun demikian, hubungan koordinatif antara komandan lapangan Kodam Jaya dan petugas keamanan Pertamina berjalan cukup baik berkat adanya forum komunikasi rutin.

### 4) Kepemimpinan

Kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam mengarahkan koordinasi lintas lembaga. Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan dalam koordinasi pengamanan objek vital nasional PT Pertamina dijalankan secara kolektif antara pejabat sipil (Kepala Kesbangpol DKI Jakarta) dan militer (Pangdam Jaya). Kedua tokoh ini berperan sebagai *facilitative leaders* yang mendorong kolaborasi horizontal dengan berbagai pihak, termasuk Polri, BPBD, dan manajemen Pertamina. Hasil wawancara menunjukkan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

bahwa gaya kepemimpinan terbuka dan komunikatif menjadi salah satu faktor utama keberhasilan koordinasi, terutama dalam mencegah tumpang tindih kewenangan di lapangan.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan koordinasi sangat dipengaruhi oleh figur pemimpin. Pergantian pimpinan sering kali menyebabkan perubahan pola komunikasi dan prioritas kebijakan. Di beberapa periode, kegiatan koordinasi menjadi lebih administratif dan kurang responsif terhadap dinamika lapangan. Kondisi ini menunjukkan belum terbangunnya sistem kepemimpinan institusional yang mampu bertahan di luar pergantian individu.

#### 5) Sumber Daya

Dimensi sumber daya mencakup ketersediaan personel, sarana, prasarana, dan anggaran yang mendukung pelaksanaan koordinasi pengamanan. Berdasarkan temuan penelitian, ketersediaan sumber daya manusia dari unsur pemerintah daerah relatif terbatas dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh TNI AD. Kodam Jaya memiliki satuan pengamanan tetap yang siaga di sekitar objek vital, sementara Pemprov DKI lebih banyak berperan pada fungsi administratif dan kebijakan. Dalam hal sarana, Pertamina telah menyediakan sistem pengawasan modern seperti CCTV terintegrasi dan security control room, namun belum sepenuhnya terhubung dengan sistem keamanan daerah.

Dari aspek anggaran, penelitian menemukan bahwa dukungan dana untuk kegiatan koordinasi masih minim. Sebagian besar pembiayaan kegiatan keamanan ditanggung oleh Pertamina melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kondisi ini sering kali menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan operasional di lapangan dan alokasi dana pemerintah. Beberapa responden menilai bahwa belum adanya mekanisme pembiayaan bersama menjadi kendala utama dalam optimalisasi sinergi. Dimensi sumber daya menegaskan bahwa meskipun dukungan sumber daya manusia dan sarana sudah memadai, keberlanjutan program koordinasi sangat

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

membutuhkan dukungan anggaran yang stabil dan sistem pendanaan lintas lembaga yang jelas.

#### 6) Resolusi Konflik

Resolusi konflik menjadi dimensi penting dalam menjaga kelangsungan koordinasi antarlembaga. Berdasarkan hasil penelitian, konflik yang muncul dalam koordinasi pengamanan PT Pertamina umumnya bersifat non-struktural, seperti perbedaan interpretasi kebijakan, ego sektoral, atau keterlambatan informasi antarunit. Pemerintah daerah dan TNI AD berupaya menyelesaikan setiap perbedaan melalui forum koordinasi bulanan yang dipimpin oleh Kesbangpol. Pendekatan musyawarah dianggap paling efektif karena mampu mempertahankan hubungan harmonis tanpa mengorbankan efisiensi kerja.

Namun, konflik juga muncul dalam konteks perbedaan kepentingan administratif. Misalnya, dalam hal tanggung jawab penanganan pascakebakaran, terdapat perdebatan antara instansi mana yang lebih berwenang mengoordinasikan pemulihan. Situasi ini sering diselesaikan dengan penetapan keputusan bersama yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi sebagai lead institution. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa penyelesaian konflik merupakan bagian dari dinamika koordinasi yang sehat. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penyelesaian konflik antarinstansi di DKI Jakarta cukup adaptif dan didukung oleh komitmen interpersonal yang kuat dari pimpinan lembaga terkait.

#### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam pengamanan objek vital nasional PT Pertamina merupakan bentuk nyata sinergi sipil–militer dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan energi nasional. Dalam konteks keamanan publik, kolaborasi kedua lembaga ini telah membuktikan pentingnya integrasi fungsi pemerintahan sipil dan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

terhadap infrastruktur strategis. Melalui forum koordinasi lintas instansi dan komunikasi operasional yang intensif, koordinasi ini berhasil membangun sistem pengamanan terpadu yang efektif meskipun masih terdapat beberapa kendala kelembagaan.

Berdasarkan analisis terhadap enam dimensi koordinasi menurut G.R. Terry (1964), dapat disimpulkan bahwa secara umum koordinasi antara pemerintah daerah dan TNI AD telah berjalan dengan baik. Dimensi komunikasi menunjukkan adanya saluran informasi yang aktif dan efisien dalam penanganan situasi darurat. Dimensi kebijakan memperlihatkan perlunya harmonisasi antara kebijakan pusat, daerah, dan militer agar koordinasi lebih konsisten dan tidak tumpang tindih. Struktur organisasi yang diterapkan telah mencerminkan kolaborasi tripartit yang efektif, meskipun perlu pembentukan satuan tugas gabungan untuk memperkuat pengambilan keputusan lapangan. Kepemimpinan yang bersifat kolektif dan fasilitatif menjadi faktor penentu terciptanya sinergi kelembagaan, sementara dimensi sumber daya dan resolusi konflik menunjukkan pentingnya pendanaan yang berkelanjutan serta mekanisme penyelesaian perbedaan yang adaptif.

Secara konseptual, penelitian ini memperkuat teori koordinasi Terry dengan menegaskan bahwa efektivitas kolaborasi antarlembaga tidak hanya bergantung pada prosedur administratif, tetapi juga pada aspek kepercayaan, kepemimpinan, dan kesetaraan peran. Secara praktis, temuan ini memberikan model koordinasi sipil–militer yang dapat direplikasi dalam konteks pengamanan objek vital nasional lainnya di Indonesia. Koordinasi yang terlembaga, transparan, dan berbasis kolaborasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola keamanan publik yang tangguh dan berkelanjutan.

## **SARAN**

Untuk memperkuat koordinasi pengamanan objek vital nasional antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan TNI AD, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, perlu adanya regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur mekanisme kerja

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

sama sipil–militer dalam konteks operasi militer selain perang (OMSP), agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan penafsiran hukum. Kedua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kodam Jaya perlu mengembangkan *joint task force* permanen yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan cepat dan pengendalian situasi darurat di lapangan. Ketiga, perlu dilakukan penguatan sistem komunikasi berbasis digital dan *real-time monitoring* untuk mempercepat respons terhadap ancaman atau insiden di objek vital nasional.

Keempat, dalam dimensi sumber daya, diperlukan pembiayaan bersama (*co-funding*) antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak perusahaan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan pengamanan dan pelatihan personel lintas lembaga. Kelima, perlu ditingkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bersama yang menggabungkan pendekatan militer, manajemen krisis, dan manajemen risiko. Keenam, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme evaluasi kolaborasi secara periodik agar setiap hambatan dan potensi konflik kelembagaan dapat diidentifikasi sejak dini.

Apabila rekomendasi ini diimplementasikan secara konsisten, maka sinergi antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan TNI AD tidak hanya berfungsi sebagai pengamanan objek vital semata, tetapi juga sebagai model nasional bagi kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan nasional di era modern.

## REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Basri, M., & Setiawan, F. (2022). Sinergi sipil-militer dalam pengamanan objek vital nasional: Studi kasus kilang minyak Balikpapan. *Jurnal Pertahanan dan Keamanan Negara*, 12(2), 201–220. <https://doi.org/10.33172/jpkn.v12i2.2022>
- Budiarto, E., & Hidayat, R. (2021). Collaborative coordination in crisis management: Lessons from public safety agencies in Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(3), 155–174. <https://doi.org/10.23960/jiakp.v9i3.2021>

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

- 
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Laporan koordinasi pengamanan objek vital nasional di wilayah DKI Jakarta*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Dwiyanto, A. (2020). *Manajemen pelayanan publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, E., & Rachman, F. (2022). Civil-military cooperation in protecting national vital assets in Indonesia: An institutional perspective. *Jurnal Kebijakan Pertahanan*, 8(1), 67–85. <https://doi.org/10.33172/jkp.v8i1.2022>
- G.R. Terry. (1964). *Principles of management*. Homewood, IL: Irwin Press.
- Hidayat, A., & Satria, D. (2023). The role of the Indonesian Army in non-war operations: Maintaining security and social stability. *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 13(1), 102–120. <https://doi.org/10.33172/jip.v13i1.2023>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kemenhan RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nugroho, R., & Astuti, D. (2021). Coordination and governance in the protection of critical infrastructure in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(4), 215–232. <https://doi.org/10.33021/jap.v10i4.2021>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Raharjo, D., & Widodo, S. (2022). The dynamic of coordination in public security management: Between authority and collaboration. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(1), 101–119. <https://doi.org/10.33021/jkmp.v11i1.2022>
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subarsono, A. G. (2020). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

- 
- Suharto, E., & Nugraha, I. (2023). Strengthening civil-military coordination for national security resilience. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 13(2), 177–194. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v13i2.2023>
- Wibisono, H., & Kurniawan, A. (2021). Improving multi-agency coordination in managing public safety and national assets. *Public Policy Journal*, 5(2), 88–106. <https://doi.org/10.1080/ppj.2021.5.2.88>
- Yuliana, N., & Prasetyo, M. (2024). Policy coherence and inter-agency coordination in the protection of strategic infrastructure. *Jurnal Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 12(1), 41–59. <https://doi.org/10.32121/japd.v12i1.2024>